

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. Salah satunya adalah pengungkapan laporan keuangan melalui internet.

Pada era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan internet untuk menyampaikan informasi telah berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet ditengah masyarakat luas. Saat ini, internet telah menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejalan dengan hal ini, banyak perusahaan yang telah menggunakan

internet sebagai perantara untuk menyampaikan informasi. Termasuk juga pemerintah daerah yang menggunakan internet untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Untuk pengertian *website* sendiri berasal dari bahasa Inggris *website* (bahasa Indonesia: situs web) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (*Local Area Network/ LAN*).

Menurut Bonson & Escobar (2005) dalam Puspita dan Martani (2010) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas.

Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya (Puspita dan Martani, 2010). Hal ini didukung dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi.

Pelaporan merupakan sarana untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi sektor publik. Laporan keuangan pemda sendiri terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Laporan keuangan merupakan proses dari akuntansi yang berisi tentang informasi keuangan.

Afryansyah (2013) berpendapat bahwa setiap kepala daerah ingin dipandang sebagai pemimpin. Oleh karena itu setiap kepala daerah selalu membuat keputusan yang akan membuat dirinya dikagumi. Salah satunya dari keberhasilan kepala daerah dalam melakukan investasi dari proyek-proyek yang membuat pelayanan kepada masyarakat bertambah. Besarnya investasi tersebut dapat dilihat dari pos belanja modal pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Styles dan Tennnyson (2007) dalam Martani dkk (2013) mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling *cost effective* bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*), mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian *trade off* penilaian. *Trade off* ini terjadi antara (1) kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga harus memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2002).

Saat ini, akademisi dan lembaga mempertimbangkan *e-government* sebagai alat yang ampuh untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan warga melalui pembentukan kembali hubungan antara warga dan pemerintah dalam hal keterbukaan, keterlibatan warga negara dalam urusan publik, aksesibilitas pelayanan publik, interaktivitas dan akuntabilitas (Chasidin dan Rokhman, 2011).

Medina (2012) berpendapat bahwa di Indonesia, penggunaan internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program *e-government* dalam membangun system informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan transfer informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien.

Laswad dkk (2005) dalam Puspita dan Martani (2010) *website* pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet.

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD), tingkat ketergantungan, ukuran pemerintahan (UP), kompleksitas pemerintahan (KP), belanja daerah (BD), dan *leverage*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief (2013) menunjukkan bahwa bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan dalam *website* pemda, begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2010). Berbeda dengan Trisnawati (2014) yang menunjukkan pengaruh positif.

Untuk variabel tingkat ketergantungan (DAU) hasil penelitian Hilmi (2012) dan Arief (2013) menyebutkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

laporan keuangan pada *website* pemda. Berbeda dengan hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2010) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif. Penelitian terdahulu untuk ukuran pemerintahan yang terdapat dalam hasil penelitian Arief (2013) dan Afransyah (2013) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani (2010) memiliki pengaruh positif. Variabel kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif menurut hasil penelitian dari Puspita dan Martani (2010) dan Medina (2012). Sedangkan menurut hasil penelitian dari Arief (2013) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda. Selanjutnya adalah belanja daerah, hasil penelitian dari Puspita dan Martani (2010) dan Arief (2013) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda. Kemudian leverage, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Trisnawati (2014) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* Pemda. Sedangkan hasil penelitian dari Medina (2012) menyebutkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan pada *website* pemda.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *website* Pemda telah melakukan pengungkapan informasi keuangan secara sukarela. Penelitian ini merujuk pada penelitian Puspita dan Martani (2010) mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam *Website* Pemda” dan Medina (2012) yang berjudul “Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia”. Terdapat dua perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama penelitian ini menambah satu variabel yaitu *leverage*. Variabel ini ditambahkan karena peneliti ingin melihat apakah tingkat *leverage* yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Perbedaan yang kedua yaitu tahun penelitian yaitu tahun 2015. Berdasarkan latar belakang diatas , maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Website Pemerintah daerah”**.

### **B. Batasan Masalah**

Obyek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten yang memiliki alamat *website* pemerintah daerah resmi dan dapat diakses. Variabel yang independen yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pada website pemda pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, dan *leverage*.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?

3. Apakah Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?
4. Apakah Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?
5. Apakah Belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui Apakah Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui apakah Belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.



6. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dan juga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktik

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah agar dapat lebih transparan dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah.

- b. Bagi Publik

Dalam penelitian ini diharapkan bagi publik agar dapat mengakses informasi yang ada dalam website pemda.